



dan keterangan dari Wajib Pajak dan fiskus dan melakukan pemeriksaan atas Kertas Kerja Pemeriksaan, Majelis memperoleh petunjuk bahwa koreksi atas pembelian bahan baku terjadi karena Wajib Pajak terlalu besar melaporkannya dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2000. Petunjuk ini antara lain diperoleh dari buku pembelian bahan milik Wajib Pajak dan bukti-bukti pendukungnya. Majelis mengungkapkan bahwa tidak ada perbedaan jumlah pembelian antara buku pembelian milik Wajib Pajak dengan jumlah pembelian dalam Kertas Kerja Pemeriksaan. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa koreksi fiskus atas pembelian bahan baku yang dimasukkan sebagai unsur HPP telah benar dan tetap dipertahankan. Berkaitan dengan koreksi positif atas penyusutan aktiva, Majelis setelah memeriksa daftar penyusutan aktiva yang diserahkan oleh Wajib Pajak mendapati kenyataan bahwa Wajib Pajak telah melakukan perhitungan penyusutan dengan cara yang sama dari tahun ke tahun secara taat azas dan konsisten. Selain itu, dalam pemeriksaan pajak tahun-tahun sebelumnya pun biaya atau cara penghitungan penyusutan ini tidak dikoreksi oleh fiskus. Hal ini diungkapkan Majelis setelah melakukan pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tahun 1999. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa koreksi positif fiskus atas biaya penyusutan baik yang dibebankan dalam HPP maupun biaya lainnya tidak memiliki dasar alasan sehingga tidak dapat dipertahankan. Dalam menganalisa sengketa atas koreksi positif biaya bunga, Majelis memperoleh petunjuk bahwa koreksi tersebut dilakukan karena fiskus menganggap Wajib Pajak memiliki deposito, tabungan dan investasi pada perusahaan lain selain memiliki pinjaman ke bank. Oleh karena itu, fiskus mengoreksi biaya bunga yang boleh dibebankan dalam SPT hanya sebesar rata-rata pinjaman dibandingkan dengan rata-rata deposito/ tabungan/investasi. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap rekening koran Wajib Pajak, Majelis berkesimpulan bahwa dana untuk melakukan investasi diperoleh dari Wajib Pajak dari pengembalian dana yang sempat dipinjamkan Wajib Pajak kepada perusahaan afiliasinya. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa investasi tersebut tidak berkaitan langsung dengan pinjaman Wajib Pajak dari kreditur karena dana untuk investasi tersebut adalah dana milik Wajib Pajak yang berasal dari pengembalian pinjaman dari perusahaan afiliasi. Apalagi dalam pemeriksaan pajak tahun sebelumnya biaya ini juga tidak dikoreksi fiskus sehingga Majelis berkesimpulan bahwa koreksi fiskus terhadap biaya bunga tidak memiliki dasar alasan yang kuat dan tidak dapat dipertahankan. Dari hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap sengketa-sengketa tersebut, Majelis memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Wajib Pajak. <sup>5</sup> Tanggapan dan Kesimpulan Kasus ini menjadi tambahan bukti bahwa dalam peraturan perpajakan kita yang berlaku sekarang masih terdapat celah-celah yang bisa menimbulkan multitafsir atau multi interpretasi di kalangan praktisi pajak. Kali ini, multitafsir atau beda pendapat tidak hanya terjadi antara Wajib Pajak dengan fiskus, bahkan antara sesama fiskus. Bagaimana tidak? Seperti yang diungkapkan Wajib Pajak dalam persidangan, dalam pemeriksaan pajak tahun sebelumnya (dalam kasus ini yang disebutkan hanya pemeriksaan tahun 1999), fiskus tidak melakukan koreksi terhadap biaya penyusutan. Namun dalam pemeriksaan pajak Tahun Pajak 2000<sup>6</sup> yang dipersengketakan dan diputus Majelis ini<sup>7</sup> fiskus memiliki persepsi dan interpretasi lain sehingga melakukan koreksi positif atas biaya penyusutan baik yang dibebankan Wajib Pajak dalam HPP maupun biaya lainnya. Adanya peraturan pajak yang mengandung multitafsir atau multiinterpretasi ini dalam kenyataannya kerap membuat susah Wajib Pajak. Sebab fiskus biasanya juga akan langsung melakukan koreksi sesuai anggapannya tanpa bersedia beradu argumentasi dalam proses pemeriksaan. Selain karena peraturan pajak yang mengandung multitafsir, ketidakmengertian fiskus mengenai line bisnis dan kegiatan operasional Wajib Pajak juga kadang menimbulkan koreksi sepihak dari fiskus. Dalam kaitannya dengan koreksi biaya penyusutan tadi misalnya. Ketidakmengertian fiskus mengenai line bisnis Wajib Pajak dan mesin-mesin yang dipergunakan dalam proses produksi menyebabkan fiskus menganggap bahwa mesin yang dipergunakan Wajib Pajak termasuk dalam kelompok aktiva lain-lain yang tidak termasuk dalam Kelompok I, II dan Kelompok IV. Sehingga dengan melandaskan kepada ketentuan dalam KMK tahun 1995 tersebut, fiskus mengelompokkannya ke dalam Kelompok III. Contoh lainnya yang menggambarkan ketidakmengertian fiskus akan line bisnis dan kegiatan operasional Wajib Pajak adalah adanya koreksi positif atas biaya bunga yang terjadi dalam kasus ini. Disini fiskus menganggap bahwa dana yang dipergunakan Wajib Pajak untuk melakukan investasi kepada perusahaan lain adalah dana yang berasal dari pinjaman. Persepsi ini dilakukan fiskus secara sepihak hanya dengan melihat aliran cash in dan cash out yang tercantum dalam rekening koran Wajib Pajak. Meskipun Wajib Pajak dalam proses pemeriksaan telah berusaha menjelaskan mengenai asal dana tersebut, namun karena ketidakmengertian fiskus mengenai kegiatan operasional Wajib Pajak dan juga ketidakmengertian fiskus dalam membaca rekening koran, fiskus tetap keukeuh menganggap bahwa dana itu berasal dari pinjaman kreditur. Akibatnya, beban bunga Wajib Pajak pun dikoreksi positif dengan cara proporsional. Biasanya jika ada beda persepsi atau beda penafsiran ini, fiskus akan dengan serta merta mempersilahkan Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan dan juga banding. Padahal untuk menempuh semua proses itu, banyak pengorbanan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak, baik yang sifatnya materil maupun non materil. Oleh karena itu diharapkan kedepannya nanti otoritas membuat dan menerbitkan aturan pajak yang tegas dan jelas sehingga multi tafsir baik antara Wajib Pajak dengan fiskus, Wajib Pajak dengan Wajib Pajak atau fiskus dengan fiskus tidak terjadi lagi. Selain itu, diharapkan masing-masing fiskus dapat mengembangkan diri dan mengembangkan pengetahuannya, khususnya pengetahuannya mengenai line bisnis dan kegiatan operasional. Sebab dengan begitu diharapkan koreksi sepihak akibat ketidaktahuan fiskus tidak terjadi lagi. Banyak cara yang bisa ditempuh fiskus untuk bisa memahami line bisnis dan kegiatan operasional Wajib Pajak. Salah satunya dengan cara meminta penjelasan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan. Di sini memang diharapkan sikap kooperatif dari Wajib Pajak yang sedang diperiksa. Sikap kooperatif Wajib Pajak terbukti bisa menjadi salah satu penyebab pelaksanaan pemeriksaan pajak menjadi lancar dan serba terbuka. Artinya jika Wajib Pajaknya kooperatif, maka fiskus pun cenderung menjadi lebih friendly dan terbuka setiap kali menemukan koreksi. Fiskus pun umumnya mau menerima tanggapan dari Wajib Pajak yang kooperatif sehingga tidak melakukan koreksi sepihak sebelum mendapatkan penjelasan dari Wajib Pajak mengenai hal-hal yang ditemukan dalam pemeriksaan ( Indonesian Tax Review Digest Volume III / Nomor 05 / 2006 ) <sup>8</sup> <sup>9</sup> 1 Lampiran III KMK Nomor 82/KMK. 04/1995 tentang Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok III; butir 7. Lain-lain: Aktiva bemujud lainnya yang tidak

termasuk dalam Kelompok I, II, dan IV. 2. SE-46/PJ.4/1995 3. Dapat terjadi bahwa dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka atau tabungan lainnya langsung atau tidak langsung berasal dari pinjaman atau dana yang berasal dari pihak ketiga yang dibebani biaya bunga. Apabila hal tersebut terjadi Wajib Pajak dapat memperkecil Penghasilan Kena Pajak secara tidak wajar, karena bunga yang terutang atau dibayar atas pinjaman tersebut dikurangkan sebagai biaya, sedangkan bunga yang diterima atau diperoleh yang berasal dari penempatan dana dalam bentuk deposito berjangka atau tabungan lainnya tidak ditambahkan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak karena telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 15%. 4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini dibenarkan penegasan sebagai berikut: a. Apabila jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya dengan atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya, maka bunga yang dibayar atau terutang atas pinjaman tersebut seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya. b. Apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya, maka atas pinjaman yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah bunga yang dibayar atau terutang atas rata-rata pinjaman yang melebihi jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya.